

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Partisipasi politik di Negara yang menganut sistem demokrasi, merupakan salah satu indikator implementasi dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan dalam keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (pemilu). Partisipasi politik juga merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas dari adanya modernisasi politik. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya jika tingkat partisipasi masyarakat rendah hal tersebut mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah dan kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih atau biasa disebut golput dalam pemilihan umum dan dalam kasus dengan adanya calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya yang menimbulkan polemik dan juga diduga berdampak pula terhadap partisipasi politik di dalam penyelenggaraan pilkada tersebut.

Pada tanggal 9 Desember 2015 Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Salah satunya adalah pilkada yang di laksanakan di Kabupaten Tasikmalaya, yang menjadi permasalahan dan menjadi polemik dalam pilkada tersebut adalah hanya tersedianya satu kontestan atau hanya ada satu calon tunggal yang mencalonkan sebagai calon bupati dan wakil bupati bagi

Kabupaten Tasikmalaya yaitu Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto yang mendaftarkan diri pada pilkada tersebut. Sehingga dalam pilkada tersebut sistem yang di pakai merupakan sebuah referendum, yaitu menerapkan konsep opsi, antara setuju dan tidak setuju di kertas suara, jika suara terbanyak setuju maka otomatis Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto akan maju kembali menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Tasikmalaya dan begitupun sebaliknya.

Sistem tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri, yaitu berdampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pilkada yang diikuti oleh calon tunggal tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum sangatlah menentukan, dan seharusnya menjadi kesempatan dimana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dengan ikut mencalonkan diri atau berpartisipasi mengikuti jalannya pilkada. Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas dari modernisasi politik, sedangkan yang terjadi di daerah Kabupaten Tasikmalaya bisa dikatakan belum mencirikan adanya modernisasi politik. Hal ini terjadi dikarenakan kondisi politik dan ekonomi yang kurang kondusif di daerah tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pun nampaknya juga akan menghadapi realitas kondisional, yaitu di satu sisi terjadi penurunan partisipasi politik pemilih, dan disisi lain akan meningkatnya jumlah Golput sehingga akan timbul apatisme politik.

Partisipasi politik aktif politik masyarakat menunjukkan adanya kegiatan yang berorientasi pada proses *input dan output politik*, sedangkan partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang bertumpu hanya pada output. Seperti di Kabupaten Tasikmalaya dimana masyarakat hanya bertumpu pada output yakni adanya kasus

calon tunggal yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu ada juga sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik aktif ataupun pasif. Kelompok ini muncul berdasarkan pada pandangan mereka yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Mereka disebut juga sebagai kelompok apatis atau golongan putih (golput).<sup>1</sup>

Adanya calon tunggal didalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu faktor menurunnya partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya, seperti yang terjadi di Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dimana terdapat 4.253 jumlah pemilih, jumlah golput sebanyak 1.586, maka dari data tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Sukarapih karena jumlah angka golput cukup tinggi pada pemilihan kepala daerah jika di bandingkan pada pilkada sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga Desa Sukarapih, yaitu Aah (35thn), beliau mengutarakan untuk apa memberikan hak suara, jika yang akan menangnya sudah jelas. Nyoblos juga tidak akan berpengaruh dikarenakan calonnya juga cuma satu, nyoblos atau tidak akan tetap pasangan tersebut yang menjadi bupati dan wakil bupatinya”.<sup>2</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya calon tunggal maka berdampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat, selain itu banyaknya kenyataan yang mengarah pada proses ketidaksejahteraan di masyarakat sehingga

---

<sup>1</sup> A.A Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, 2009. *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung: Pustaka Setia. hal. 101.

<sup>2</sup> Wawancara dengan salah satu pemilih di Desa Sukarapih, Aah (35thn). 20 November 2015.

menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat pada institusi-institusi negara, yang akhirnya menimbulkan proses demokrasi secara keseluruhan semakin rapuh. Hal yang terjadi di Desa Sukarapih adalah apatisme politik di kalangan masyarakatnya, tentu saja hal tersebut sangat berbahaya karena jika hal ini terus terjadi maka akan menghilangkan fungsi kontrol politik masyarakat terhadap institusi politik yang ada. Masyarakat tidak lagi peduli terhadap tingkah laku elit politik yang tidak berpihak kepada mereka. Apatisme politik yang terjadi merupakan refleksi kesadaran bahwa politik bagi masyarakat *is not the whole of life*. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan menurunnya partisipasi politik di Desa Sukarapih.

Partisipasi politik masyarakat dengan adanya calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya menarik untuk diteliti. Karena memang dengan adanya calon tunggal menjadi polemik bagi pemilih di Desa Sukarapih, sehingga berdampak terhadap tingkat partisipasi masyarakat khususnya dalam kegiatan kenegaraan yaitu pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Tasikmalaya. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam praktik demokrasi di Indonesia harus tetap tinggi dan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan pilkada saja tetapi harus terus berlanjut. Karena tingkat partisipasi politik masyarakat merupakan alat kontrol masyarakat terhadap para elit politik dalam merumuskan kebijakan serta mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti akan melakukan penelitian dengan memfokuskan pada pemahaman dan analisa mengenai partisipasi politik warga

Desa Sukarapih di Kabupaten Tasikmalaya dengan adanya calon tunggal. Penelitian tuangkan dalam judul “Partisipasi Politik Masyarakat dengan Adanya Calon Tunggal pada Pilkada Serentak Desember 2015 (Kajian di Desa Sukarapih, Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya)”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Adanya sikap apatis yang menjadi faktor penghambat dalam tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Sukarapih dalam pemilihan kepala daerah serentak dengan calon tunggal pada Desember 2015
2. Adanya calon tunggal menimbulkan polemik tersendiri bagi masyarakat Desa Sukarapih
3. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon tunggal bupati dan wakil bupati dikarenakan dilihat dari periode sebelumnya, dari segi ekonomi, fasilitas umum dan kesejahteraan sosial masyarakatnya tidak terdapat perubahan yang signifikan sehingga menimbulkan sikap apatis politik masyarakat ketika pilkada serentak.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Sukarapih tentang adanya calon tunggal dalam pilkada serentak Desember 2015 di Kabupaten Tasikmalaya?

2. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada dengan adanya calon tunggal di Desa Sukarapih Kabupaten Tasikmalaya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Sukarapih dengan adanya calon tunggal pada pilkada 2015
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dengan adanya calon tunggal pada pilkada di Desa Sukarapih Kabupaten Tasikmalaya.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah diungkapkan di atas, maka kegunaan dalam penelitian ini dapat sesuai dengan kegunaan penelitian yang diharapkan, ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis akan memberikan sumbangan terhadap keilmuan sosiologi yaitu terhadap penerapan konsep teori pilihan rasional James Coleman, khususnya dalam partisipasi politik masyarakat pada pilkada serentak di Kabupaten Tasikmalaya dengan adanya calon tunggal.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat untuk lembaga pemerintahan, elit politik, dan diharapkan dapat memecahkan dan memberikan solusi terhadap rendahnya minat masyarakat pada kegiatan-kegiatan politik negara yang

dikarenakan mulai terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat kepada para elit politik yang dikhawatirkan akan menimbulkan apatisme politik politik dari masyarakat yang nantinya akan membahayakan pada proses demokrasi yang dimana proses demokrasi membutuhkan kontrol sosial dan politik dari masyarakat. Maka pemerintah dan para elit politik dituntut untuk lebih baik dan lebih responsif terhadap berbagai tuntutan yang muncul.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam, ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Herbert McClosky yaitu seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi politik masyarakat, khususnya ketika pemilihan umum di dalam ilmu politik merupakan bagian dari kajian perilaku politik. Partisipasi Politik menurut Huntington dan Joan Nelson<sup>4</sup> adalah sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang memiliki relevansi politik ataupun hanya

---

<sup>3</sup> Ramlan Surbakti, 2007. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia. hlm. 140.

<sup>4</sup> Muslim Mufti, 2013. *Teori-teori Politik.*, Bandung: Pustaka Setia. hlm. 151.



mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah. Pendapat lain mengenai partisipasi politik seperti yang diungkapkan oleh Rasinski dan Tyler yang mengungkapkan bahwa inti dari partisipasi politik adalah tindakan masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan politik. Oleh karena itu, partisipasi politik individu di dalam masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupan mereka.

Dalam partisipasi, juga diperlukan persepsi untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat mengenai sesuatu hal. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat panca indra juga disebut sebagai proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak akan lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indra, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengaran, dan panca indra lainnya beserta fungsinya.<sup>5</sup>

Partisipasi politik masyarakat seperti yang dijelaskan oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam piramida menjelaskan tingkat partisipasi politik yang di bagi menjadi empat kategori, yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Walgito, 2010. hlm. 99.

<sup>6</sup> Muslim Mufti, *Op.Cit.*, hlm. 153.



1. Piramida tertinggi adalah aktivis, yaitu pejabat partai penuh waktu atau pemimpin partai atau kelompok kepentingan.
2. Satu tingkat di bawah aktivis adalah partisipan, yaitu orang-orang yang bertugas melakukan kampanye, merupakan anggota aktif suatu partai atau kelompok kepentingan, dan lain-lain.
3. Satu tingkat dibawah partisipan adalah kelompok pengamat yang mengorientasikan dirinya pada kehadiran dalam rapat-rapat umum, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, pemberi suara dalam pemilihan umum, dan lain sebagainya.
4. Pada bagian paling bawah adalah kelompok orang-orang yang apolitik (*apathy*).

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum apalagi di negara demokrasi dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari pelaksanaan demokrasi tersebut. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap dapat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dalam partisipasi politik masyarakat dibutuhkan pilihan yang rasional dan logis dalam menentukan pasangan calon yang akan memimpin atau menjabat di suatu daerah.

Pilihan rasional berakar dari model ekonomi pertukaran pasar, dimana barang dan jasa dianggap dibuat dan dibeli oleh produsen dan konsumen yang rasional. Model ini tidak bisa dengan mudah untuk diterapkan dalam dunia politik, dimana alturisme, ideologi, jaringan sosial, dan rasa kewarganegaraan semuanya berperan dalam membentuk perilaku orang. Demikian juga, mengenai persoalan

*free rider* akan menguat hanya jika kita menerima individualisme abstrak yang menjadi dasarnya. Lagi pula, akan sangat rasional untuk membuang sampah ke jalan kereta di dekat rumah dibandingkan dengan pergi lima mil ke tempat pembuangan sampah terdekat.

Namun, jika semua individu dalam masyarakat bertindak seperti ini, kondisi yang memungkinkan terjadi ialah tindakan egois semacam itu yang akan segera lenyap. Demikian juga, tanpa individu menganggap serius mengenai kewajiban kewarganegaraannya, basis kebebasan kita dalam komunitas politik akan tergerus. Oleh karena itu, akan sangat rasional untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Bahkan hal ini tersirat dalam gagasan Aristoteles bahwa manusia pada hakikatnya adalah “binatang politik”. Politik adalah ungkapan kemauan rasionalitas manusia.

Oleh karena itu, kita tidak perlu menyanggah arti penting pengambilan keputusan rasional bagi partisipasi politik, misalnya seorang pemberi suara yang bijaksana akan menilai kandidat secara rasional sebelum mereka memberikan suara. Namun seperti yang diungkapkan oleh Green dan Shapiro tantangan bagi teori pilihan rasional adalah pertanyaan bagaimana gagasan rasionalitas berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan pendorong lainnya. Bagi kaum elitis demokratis, rasionalitas sebagai suatu faktor di dalam politik hanyalah signifikan bagi mereka yang memerintah. Sifat emosional massa menandakan bahwa mereka hanya dapat dipercaya untuk melakukan sekedar memberikan persetujuan kepada mereka secara periodik kepada salah satu program yang bersaing yang dibuat oleh kaum elit.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Keith Faulks, 2012. *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*, Bandung :Nusa Media. hlm. 232-233.

Coleman menyatakan bahwa pilihan rasional dimana individu memiliki suatu tujuan di dalam mengambil keputusan yang dimana individu bertindak dan mengambil keputusan yang menurut mereka masih rasional sebagai pilihan teoritis pilihan rasional, Coleman bertolak dari individu dan dari gagasan bahwa semua hak dan sumber daya ada di tingkat individu ini. Kepentingan individu ini mempunyai suatu kepentingan dimana individu menentukan jalannya suatu peristiwa. Menurut Coleman secara konseptual dari titik dimana semua kedaulatan terletak di tangan manusia atau individu maka terbuka peluang untuk melihat seberapa baiknya kepentingan utama mereka yang disadari oleh sistem sosial yang ada.<sup>8</sup>

Persoalan bagi teori pilihan rasional dengan partisipasi masyarakat adalah apabila kepentingan pribadi adalah satu-satunya dasar untuk tindakan politik, bagaimana bisa kita menjelaskan besarnya waktu dan usaha yang dicurahkan warga negara untuk keanggotaannya dalam perkumpulan politik tanpa bayaran. Partisipasi masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan psikologis, dimana karakteristik sosiologis, latarbelakang keluarga, sosialisasi, dan pengalaman hidup menjadi variabel yang mempengaruhi pada tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada. Dan dalam kenyataannya ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya ketika akan memberikan hak suaranya, ada juga yang datang ke TPS namun tiba-tiba tidak jadi memberikan hak suaranya (golput).

Hal tersebut disebabkan oleh adanya ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi politik seseorang, ada

---

<sup>8</sup> George Ritzer, 2010. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana. hlm. 391.

faktor situasional yang terjadi yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Faktor situasional tersebut bisa berupa isu-isu politik pada kandidat yang di calonkan, yang dimana isu politik ini menjadi bahan pertimbangan yang penting dimana para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaian terhadap isu-isu politik yang terjadi. Artinya pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

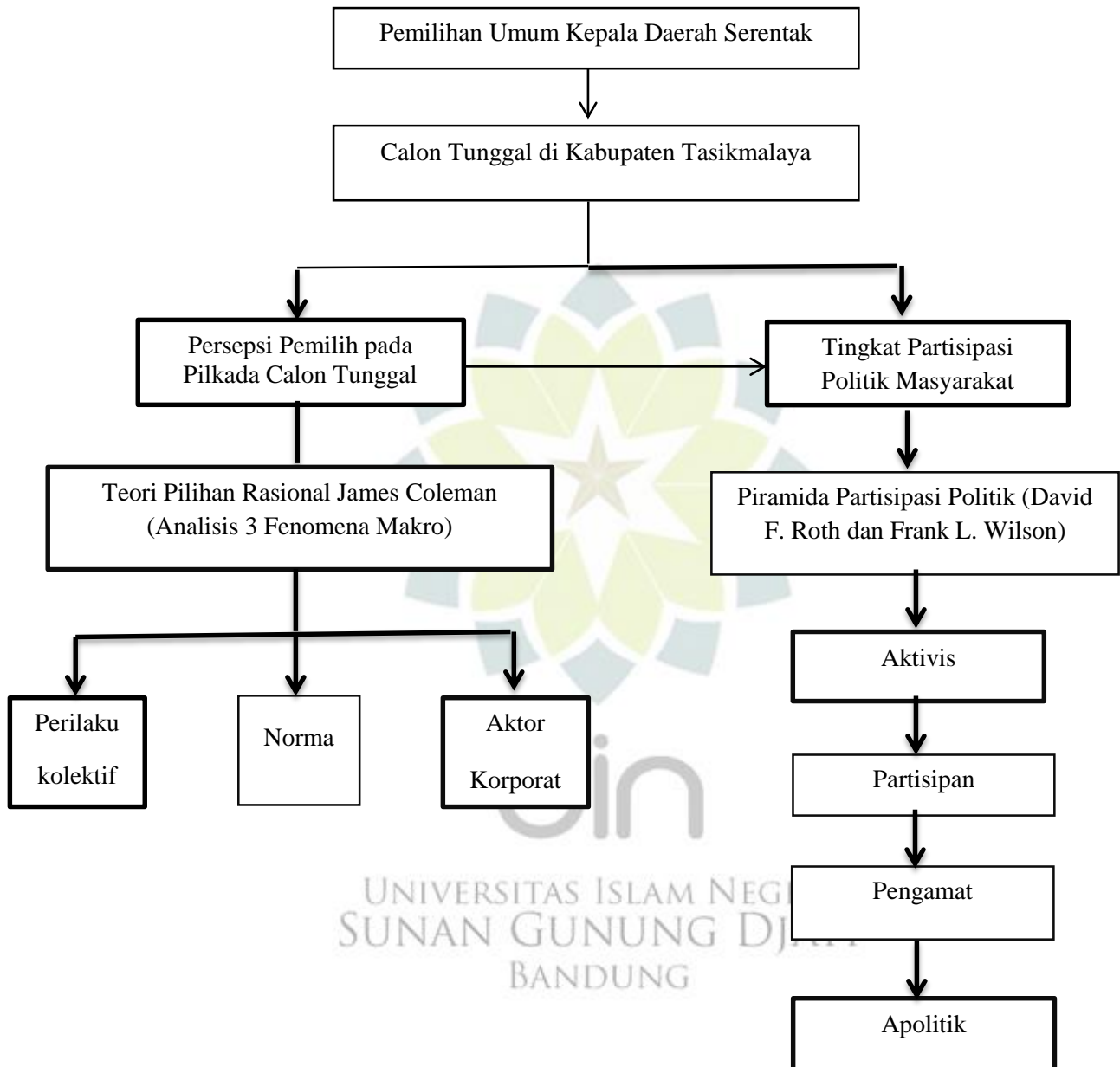
Dengan menggunakan teori pilihan rasional, dapat diambil kesimpulan bahwa para pemilih dapat menggunakan rasionalitasnya dalam menentukan pilihannya terhadap pasangan calon yang maju dalam Pilkada. Sebagian para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap visi, misi, dan program kerja partai dan kandidat. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah faktor kebetulan atau kebiasaan semata dan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan umum, menurut fikiran dan pertimbangannya yang logis.

Partisipasi politik masyarakat, menggunakan rasionalitas dalam pemilihan umum juga muncul ketika mereka berfikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan hak pilih nya. Masyarakat dan calon kepala daerah sama-sama memiliki kepentingan terhadap sumber daya yakni uang dan jabatan politik yang dimana keduanya saling mempengaruhi. Calon kepala daerah memberikan penawaran yang menjanjikan keuntungan untuk masyarakat, dan masyarakat juga memberikan penawaran berupa dukungan suara untuk memenangkan pasangan calon. Sehingga akhirnya masyarakat dan calon kepala

daerah terlibat dalam sebuah hubungan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing.



**Gambar 1.1**  
**Skema Konseptual**





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG